RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 2023 Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun sebagaimana telah direview pada Tahun 2022 akan berakhir pada Tahun 2023. Dokumen tersebut berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir Undang Nomor 10 pada Tahun 2023. Sesuai ketentuan Undang Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Pemilihan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada Tahun 2023 diinstruksikan membuat dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dalam penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Strategis (Renstra PD) memperhatikan Penyelarasan program

prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Kebijakan nasional; (regulasi yang berlaku; dan saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi : Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain. Keterkaitan dengan Perencanaan K/L dan Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi, serta dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan memperhatikan Perencanaan Kementerian/ Lembaga, Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten /Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk untuk kurun waktu 3 (tiga) Tahun (2024 – 2026) setelah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun (2024 – 2026) sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
c. Memberikan gambaran perencanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan;
e. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas penyebab terjadinya Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau Indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.7 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tabel 2.8 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat tentang sasaran layanan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi dan urusan yang diampu.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam menjalankan pemberian layanan yang baik maka diperlukan mitra sebagai bentuk sinergitas antar instansi

maupun Lembaga terkait.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Isu Strategis

Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RT-RW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Memuat tentang tujuan dan sasaran yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi.

4.2 Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

Memuat tentang kerangka logis merupakan kerangka atau alat dalam melaksanakan perencanaan, proses, hasil sampai dengan evalusi. Cascading merupakan keselaran antara diagram kinerja mulai dari tujuan sasaran daerah sampai dengan tujuan sasaran perangkat daerah sampai sub kegiatan. Sedangka Proses Bisnis merupakan peta kinerja Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang disajikan dalam Tabel 5.1.

5.1 Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Memuat strategi dan arah kebijakan yang ada pada Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi dan urusan yang diampu.

BAB VI RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah disajikan dalam Tabel 6.1.

6.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif

Memuat perencanaan berkaitan dengan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indicator, target dan pagu indikatif berdasarkan Tahun 2024, 2025, dan 2026 sebagai acuan dokumen perencanaan tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan;
b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga;
d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids (odha) dan penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakani Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
b. Perumusan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem informasi data gender dan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;

c. Pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
d. Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak.

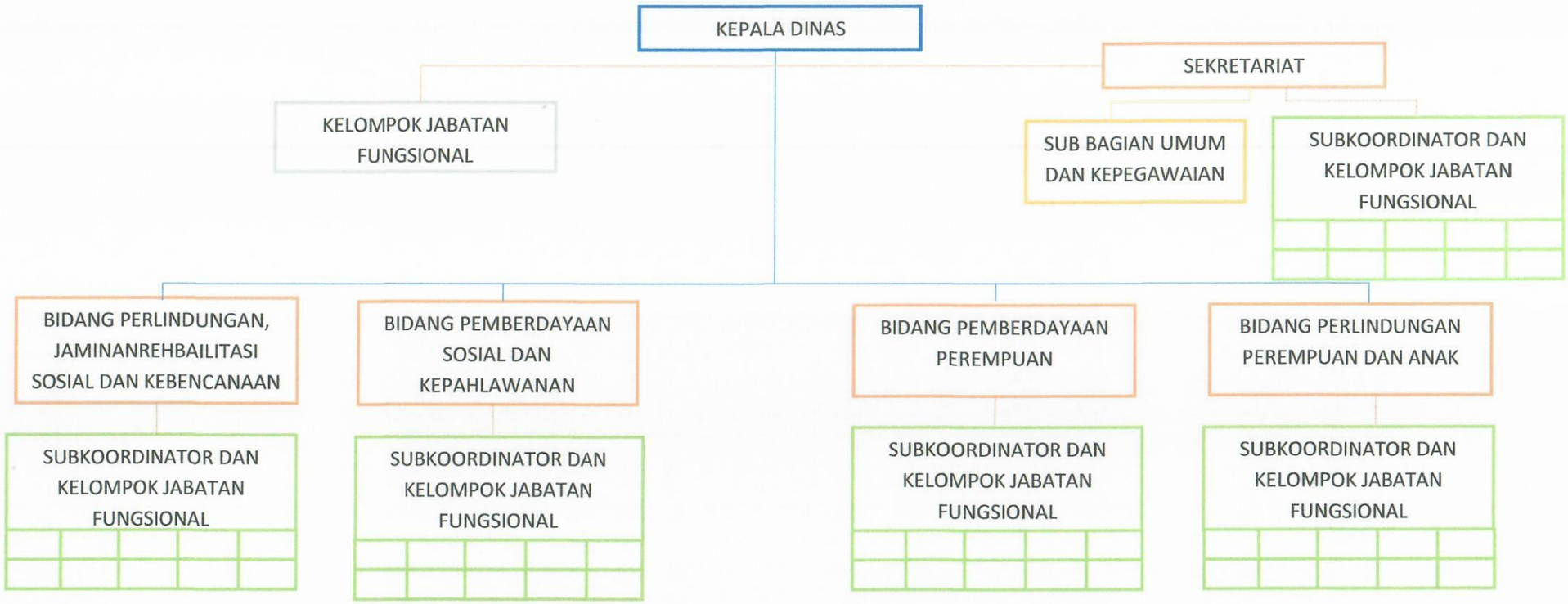
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;

d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial PPPA Per Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN	
		L	P	L	P
1	SD Sederajat	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-
3	SMA Sederajat	2	-	13	2
4	D3	-	-	-	3
5	S1	6	12	7	7
6	S2	2	2	-	1
Jumlah		**10**	**14**	**21**	**13**

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	-	2
3	Golongan III	4	12	16
4	Golongan IV	4	2	6

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial, PPPA Per Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik	
1	AC	4	0	8	12
2	Laptop	9	4	3	16
3	Personal Komputer Monitor	5	6	0	11
4	PC Unit	4	3	2	9
5	Kipas Angin	6	2	0	8
6	Handy Talky	27	0	0	27
7	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor	4	4	4	12
8	Kursi Rapat Pejabat	50	0	0	50
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Filing Cabinet Besi	6	0	0	6
10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain Lain	11	0	0	11
11	Kendaraan Roda 4	0	9	2	11
12	Kendaraan Roda 2	4	0	61	65
13	Kursi Kerja Pejabat, Kursi Kerja Pejabat Eselon	12	3	6	21
14	Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Visual, Proyektor dan Attachment	1	1	0	2
15	Mebeler Kursi Biasa	2	0	0	2
16	Mebeler Tempat Tidur Besi	2	0	0	2
17	Mebeler Kursi Tamu	1	0	0	1
18	Mebeler Sofa	1	0	0	1
19	Mebeler Rak Kayu	2	0	0	2

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. AC berjumlah 12 unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 4 Unit. Barang rusak ringan berjumlah 0. Barang yang baik berjumlah 8 Unit dengan rincian Sekretariat 3 Unit, Bidang PJRSK 0 Unit, Bidang PSK 1 Unit, Bidang PP 2 Unit, dan Bidang PPA 2 Unit.
2. Laptop berjumlah 16 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 9 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 4 Unit dengan rincian Sekretariat 3 Unit dan Bidang PJRSK 1 Unit. Barang yang baik berjumlah 3 Unit dengan rincian Sekretariat 1 unit, Bidang PSK 1 unit, dan Bidang PP 1 unit.
3. Personal Komputer Monitor untuk administrasi perkantoran sebanyak 11 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 5 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 6 Unit dengan rincian Sekretariat 2 Unit, Bidang PJRSK 1 Unit, Bidang PSK 1 Unit, Bidang PP 1 Unit, dan Bidang PA 1 Unit. Barang yang baik berjumlah 0.
4. PC Unit untuk administrasi perkantoran sebanyak 9 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 4 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 3 Unit dengan rincian Bidang PJRSK 1 Unit, Bidang PSK 1 Unit, dan Bidang PA 1 Unit. Barang yang baik berjumlah 2 Unit dengan rincian Sekretariat 1 Unit dan Bidang PJRSK 1 Unit.
5. Kipas Angin berjumlah 8 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 6 terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 2 dengan rincian Bidang PP 1 Unit dan Bidang PA 1 Unit. Barang yang baik berjumlah 0.
6. Handy Talky berjumlah 27 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 27 terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.

7. Tanah dan bangunan terdapat di 4 (empat) lokasi ditempati untuk bangunan Kantor Dinas, WCC untuk penanganan Kasus KTPA, Rumah Singgah untuk penanganan kasus PPKS/ PMKS, dan TMP (Taman Makam Pahlawan) Yudha Pralaya.
8. Kursi Rapat Pejabat berjumlah 50 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 50 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang barang yang baik berjumlah 0.
9. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Filing Cabinet Besi berjumlah 6 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 6 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.
10. Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Lain-Lain berjumlah 11 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 11 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.
11. Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Dinas berjumlah 11 Unit terdiri dari barang rusak berat berjumlah 0. Barang rusak ringan berjumlah 9 Unit dengan rincian Panther 1 Unit, Carry 5 Unit, Luxio (Molin) 1 Unit, APV (Ksatria Sosial) 1 Unit, Rescue (Tagana) 1 Unit. Barang yang baik berjumlah 2 dengan rincian Innova 1 unit dan Avanza 1 Unit.
12. Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas berjumlah 65 unit terdiri dari barang rusak berat berjumlah 4 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan Barang yang baik berjumlah 61 dengan rincian Beat 2 unit untuk Sekret, Vario Merah Hitam 2 unit untuk Bidang PJRSK dan Bidang PSK, Vario Biru Putih 2 Unit Bidang PA, Frego 9 unit untuk semua analis kebijakan ahli muda dan penyuluh sosial, GL 1 Unit sekret, KLX 2 Unit untuk Tagana, Revo 21 Unit untuk PKH, KLX 2 Unit untuk PKH, Jupiter 19 Unit untuk TKSK, KLX 1 Unit untuk TKSK.

13. Kursi Kerja Pejabat. Kursi Kerja Pejabat Eselon berjumlah 21 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 12 terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 3 Unit dengan rincian Sekretariat (Kasubag Umum dan Kepegawaian, Perencana Ahli Muda, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah). Barang yang baik berjumlah 6 Unit dengan rincian Sekertariat 2 Unit, Bidang PJRSk 1 Unit, Bidang PSK 1 Unit, Bidang PP 1 Unit, dan Bidang PA 1 Unit.
14. Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Visual, Proyektor dan Attachment berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 1 Unit dengan rincian Sekretariat, dan Barang yang baik berjumlah 0.
15. Mebeler Kursi Biasa berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.
16. Mebeler Tempat Tidur Besi berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang barang yang baik berjumlah 0.
17. Mebeler Kursi Tamu berjumlah 1 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.
18. Mebeler Sofa berjumlah 1 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.
19. Mebeler Rak Kayu berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar sebagai buruh tani masih banyak yang tergolong masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebesar 11,24 % dan meningkat di tahun 2020 menjadi 11,62% sebagai dampak pandemi Covid-19 sedangkan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 11,85 % sebagai dampak pandemi Covid-19. Pandemi covid 19 berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja. Angka kemiskinan ini merupakan data makro hasil survei Sosial Ekonomi Nasional. Angka kemiskinan sering dipertentangkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan data mikro sehingga by name dan by addresnya ada. Data terpadu kesejahteraan sosial merupakan data sasaran bagi calon penerima program program bantuan sosial yang pendataannya berdasar 40% penduduk yang pengeluarannya terendah secara nasional. Program yang secara nasional digunakan untuk intervensi DTKS diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) , Jaminan Kesehatan , Jaminan Pendidikan dan sebagainya.

Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum presentasi kemiskinan di kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dapat diukur dengan 2 indikator. *Pertama*, Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 106,38% dari target 94%. Hal tersebut berdasarkan data PMKS/PPKS tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data PMKS/PPKS Tahun 2022
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Jenis_PMKS	Jumlah_PMKS_Keseluruhan	Jumlah_PMKS_yang_Tertangani	Satuan
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Keluarga Fakir Miskin	47.394	47.394	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Anak Jalanan	14	14	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Tuna Susila	39	39	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Pengemis	2	2	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	46	46	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Anak Balita Terlantar	4	4	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Anak Terlantar	727	727	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Anak Berhadapan dengan Hukum	225	225	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	**Anak dengan Kedisabilitasan :**	**40**	**40**	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	a. Tubuh	15	15	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	b. Netra	11	11	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	c. Cacat Wicara	8	8	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	d. Mental	6	6	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	e. Cacat Ganda	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	1	1	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	32	32	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Lanjut Usia Terlantar	9	9	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	**Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis**	**452**	**452**	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	a. Tubuh	388	388	Orang

Jawa Timur	Nganjuk	2022	b. Netra	41	41	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	c. Cacat Wicara	4	4	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	d. Mental	10	10	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	e. Cacat Ganda	9	9	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	f. Penderita Penyakit Kronis	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Pemulung	4	4	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)	1.253	1.253	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	97	97	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	2.043	2.043	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Korban Penyalah Gunaan Napsa	2	2	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Korban Trafficking	4	4	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	**Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah**	**1**	**1**	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	a. Wanita	1	1	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	b. Laki - laki	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	c. Lanjut Usia	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	45	45	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Korban Bencana Alam	1.916	1.916	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Korban Bencana Sosial	23	23	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60	60	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	2	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2022	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0	0	Orang
Jumlah				**54.435**	**54.435**	**Orang**
Persentase jumlah PMKS yang tertangani:					**100**	%

Kedua, Persentase Jumlah PMKS/ PPKS dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 81,51% dari target sebesar 3,97%. Berdasarkan data jumlah PMKS/PPKS tahun 2022 dan jumlah penduduk Tahun 2022, sebagai berikut:

- Jumlah penduduk tahun 2022 1.117.033 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang terdata th. 2022 sebanyak 54.435 Orang
- Persentase PMKS/ PPKS terhadap jumlah penduduk th. 2022 4,87 %
- Target Renstra tahun 2022 3,97 %
- Capaian Kinerja Tahun 2022 81,51%

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah yang mengampu 2 (dua) urusan, salah satunya urusan sosial dimana kinerja yang ditangani adalah penanganan PMKS/PPKS di Kabupaten Nganjuk melalui program Ksatria Sosial. Program Kstatria Sosial merupakan layanan untuk penjangkauan PMKS/PPKS guna mengatasi permasalahan sosial yang bergerak secara dinamis setiap bulan, triwulan, semester maupun dalam 1 tahun.

Data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan data penanganan atau data penjangkauan, berbeda halnya dengan data bantuan sosial dan hibah.

Bantuan Sosial yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu

a. Bantuan sosial lansia miskin, bantuan untuk lansia miskin di Nganjuk untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan dasar
b. Bantuan Sosial Siswa Miskin, bantuan untuk siswa miskin dalam mendapatkan layanakan pendidikan dan meringankan beban dalam mendapatkan fasilitas pendidikan
c. Bantuan Sosial Disabilitas, bantuan guna meringankan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan sebagai alat bantu untuk mobilisasi kegiatan sehari-hari.
d. Hibah PMI, hibah uang untuk penanganan kedaruratan
e. Hibah WCC. Hibah uang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga hal ini dapat menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Nganjuk.

Berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.

Sedangkan sasaran Meningkatnya Jumah PSKS yang Aktif diukur dengan indikator Persentase jumlah PSKS yang aktif dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 119% dari target

sebesar 60%. Data tersebut diperoleh berdasarkan data Jumlah PSKS Tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.5 Jumlah PSKS Tahun 2022
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	JENIS PSKS	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA AKTIF	ANGGOTA TIDAK AKTIF	AKTIF
					%
1.	Pekerja Sosial Profesional	3	3	0	100
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	645	361	284	55,96
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18	18	0	100
4.	Organisasi Sosial	22	22	0	100
5.	Karang Taruna	285	285	0	100
6.	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	0	100
	Jumlah/Persentase Yang Aktif	**993**	**709**	**284**	**71,40**

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki – laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0 – 100 persen, apabila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki dan IPM perempuan sama seimbang.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan lakilaki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dapat diukur dengan 3 indikator. *Pertama*, Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 78,62% dari target sebesar 40%. *Kedua*, Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak Yang Difasilitasi Penyelesaiannya dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 100%. *Ketiga*, Persentase Kecamatan Layak Anak dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 400% dari target sebesar 10%.

Kasus kekerasan yang terjadi merupakan fenomena gunung es, yang berarti masih banyak kasus lain yang belum terungkap dan belum melapor. Tahun 2019-2022 jumlah kasus kekerasan meningkat. Diduga penyebabnya antara lain adalah:

1. Rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
2. Adanya budaya patriarki yang masih tinggi
3. Keadaan ekonomi atau tingginya tingkat kemiskinan
4. Adanya isu perselingkuhan dan pernikahan dini
5. Rendahnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak
6. Pengaruh lingkungan yang tidak kondusif
7. Dampak perkembangan teknologi yang disalahgunakan

Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada Tahun 2022.

Tabel 2.6
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Telah Ditangani Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis kasus									
		Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Lainnya	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Sawahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Ngetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Berbek	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
4	Loceret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prambon	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
7	Ngronggot	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Kertosono	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
9	Patianrowo	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
10	Baron	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Tanjunganom	-	-	1	-	-	5	1	-	-	1
12	Sukomoro	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
13	Nganjuk	1	-	5	2	-	2	2	-	-	2
14	Bagor	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
15	Wilangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	Rejoso	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
17	Gondang	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
18	Ngluyu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jatikalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH :		**2**	**2**	**15**	**5**	**2**	**19**	**4**	**1**	**0**	**3**
JUMLAH TOTAL :		**53**									

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain dalam SDGs khususnya pada *Goal* 11 mengenai kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan dan *Goal* 16 mengenai masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non–diskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi anak selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia internasional.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2022 terlihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sebelum Perubahan																
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	100%	94%	-	88%	90%	92%	-	93,09f %	93,09 %	97,80 %	-	95%	97%	106,30 %	-
2	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	100%	3,97%	-	5,17 %	7,94 %	4,47 %	-	5,97%	5,97%	4,76%	-	87%	80%	91,80%	-
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	100%	60%	-	45%	50%	55%	-	73,75 %	73,75 %	68,37 %	-	61%	68%	124,30 %	-
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	100%	40%	-	25%	30%	35%	-	33,68 %	33,68 %	32,78 %	-	74%	89%	93,68%	-
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	-
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	75%	-	15%	5%	5%	-	25%	25%	5%	-	60%	100%	100%	-
Setelah Perubahan																

1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	100%	94%	-	-	-	-	94%	-	-	-	100%	-	-	-	106,38%
2	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	100%	4,17	-	-	-	-	4,17	-	-	-	4,87%	-	-	-	85,62%
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	100%	60%	-	-	-	-	60%	-	-	-	71,40%	-	-	-	119%
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	100%	40%	-	-	-	-	40%	-	-	-	31,45%	-	-	-	78,62%
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	10%	-	-	-	-	10%	-	-	-	40%	-	-	-	400%

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sebelum Perubahan															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantor	643.433.000	558.895.700	586.601.000	620.187.000	586.139.142	487.671.828	-	-	91,10 %	87,30 %	-	-	601.164.350	536.905.485
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	820.484.600	1.031.244.000	1.077.375.000	1.149.941.000	781.437.562	1.059.494.508	-	-	95,24 %	102,70 %	-	-	925.864.300	920.466.035
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.800.000	5.000.000	10.650.000	11.260.000	8.200.000	4.800.000	-	-	93,18 %	96,00 %	-	-	6.900.000	6.500.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Refocusing	110.941.000	117.293.000	-	Refocusing	-	-	-	-	-	-	0	0

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	23.658.000	16.641.000	17.593.000	14.557.000	22.652.000	-	-	97,05 %	95,75 %	-	-	19.329.000	18.604.500
6	Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	2.093.098.000	1.109.508.900	4.193.000.000	4.362.000.000	1.705.578.550	1.062.196.235	-	-	81,49 %	95,74 %	-	-	1.601.303.450	1.383.887.393
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma/ Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	-	Refocusing	46.595.000	49.263.000	-	Refocusing	-	-	-	-	-	-	0	0
8	Program Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	826.160.000	542.850.500	1.643.469.000	1.713.637.000	770.916.300	482.549.500	-	-	93,31 %	88,89 %	-	-	684.505.250	626.732.900

9	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	620.000.000	495.992.500	933.014.000	986.434.000	500.270.100	418.505.025	-	-	80,69 %	84,38 %	-	-	557.996.250	459.387.563
10	Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat	722.604.000	327.241.800	1.303.558.000	1.378.193.000	638.269.550	258.438.275	-	-	88,33 %	78,97 %	-	-	524.922.900	448.353.913
Setelah Perubahan															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	4.037.893.150	5.301.529.956	-	-	3.950.914.629	4.919.000.258,20	-	-	97,85 %	92,78 %	4.669.711.553	4.434.957.444
2	Program Pemberdayaan Sosial	-	-	325.366.950	347.516.950	-	-	270.740.450	331.193.330,40	-	-	83,21 %	95,30 %	336.441.950	300.966.890
3	Program Rehabilitasi Sosial	-	-	4.112.470.700	10.213.935.950	-	-	7.132.244.200	7.747.075.065,60	-	-	173,43 %	75,85 %	7.163.203.325	7.439.659.633
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	812.259.850	3.817.499.850	-	-	759.023.350	3.472.660.850	-	-	93,45 %	90,97 %	2.314.879.850	2.115.842.100

5	Program Penanganan Bencana	-	-	240.999.800	5.908.840.750	-	-	239.685.450	5.575.995.554	-	-	99,45%	94,37%	3.074.920.275	2.907.840.502
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	34.397.250	53.882.850	-	-	28.176.600	51.658.090	-	-	81,92%	95,87%	44.140.050	39.917.345
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	186.155.000	244.600.000	-	-	131.859.500	235.875.177	-	-	70,83%	96,43%	215.377.500	183.867.339
8	Program Perlindungan Perempuan	-	-	18.724.100	93.724.100	-	-	17.675.000	91.874.100	-	-	94,40%	98,03%	56.224.100	54.774.550
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	37.843.000	147.667.550	-	-	36.526.500	132.959.340,40	-	-	96,52%	90,04%	92.755.275	84.742.920
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	0,00	17.530.000	-	-	0,00	16.688.686,40	-	-	#DIV/0!	95,20%	8.765.000	8.344.343
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	169.728.600	223.506.600	-	-	60.171.250	206.682.056	-	-	35,45%	92,47%	196.617.600	133.426.653

12	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	80.580.000	68.580.000	-	-	78.120.000	64.889.404	-	-	96,95 %	94,62 %	74.580.000	71.504.702

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra Dinas Sosial PPPA 2018-2023					Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	-	-	-	-	-	-	-	99,57%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	-	-	-	-	-	-	-	90,91%	86%	100%	100%	
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	

5	Jumlah warga negara korban bencana daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 urusan, yaitu Urusan Bidang Sosial dan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Bidang Sosial kelompok sasarannya sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan 26 Kriteria PMKS/ PPKS sebagai berikut:

1. Keluarga Fakir Miskin
2. Anak Jalanan
3. Tuna Susila
4. Pengemis
5. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik
6. Anak Balita Terlantar
7. Anak Terlantar
8. Anak Berhadapan dengan Hukum
9. Anak dengan Kedisabilitasan
    f. Tubuh
    g. Netra
    h. Cacat Wicara
    i. Mental
    j. Cacat Ganda
10. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah
11. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
12. Lanjut Usia Terlantar
13. Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis
    a. Tubuh
    b. Netra
    c. Cacat Wicara
    d. Mental
    e. Cacat Ganda
    f. Penderita Penyakit Kronis
14. Pemulung
15. Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)

16. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
17. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)
18. Korban Penyalah Gunaan Napsa
19. Korban Trafficking
20. Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah
    a. Wanita
    b. Laki-Laki
    c. Lanjut Usia
21. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
22. Korban Bencana Alam
23. Korban Bencana Sosial
24. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil.

Sedangkan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kelompok sasarannya adalah Anak usia 0-18 Tahun termasuk yang dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perempuan usia di atas 18 Tahun sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri PPA No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA, Lembaga Pemerintah (Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan, dan Instansi Pemerintah), Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, PKK Desa/ Kelurahan, Lembaga Sekolah, dan Keluarga.

2.6 Mitra Dinas Sosial PPPA dalam Pemberian Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan layanan yang di dukung oleh beberapa mitra kerja sehingga dalam pelaksanaannya terdapat koordinasi yang baik, sebagai berikut:

1. Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk
2. PPA Polres Kabupaten Nganjuk
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
6. Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

8. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk
9. BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
10. Satpol PP Kabupaten Nganjuk
11. BPBD Kabupaten Nganjuk
12. Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk
13. BPJS Kabupaten Nganjuk
14. BPS Kabupaten Nganjuk
15. RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk
16. RSUD Nganjuk Kabupaten Nganjuk
17. Asisten Pemerintahan dan Kesra
18. PMI Kabupaten Nganjuk
19. WCC Kabupaten Nganjuk
20. Puspa Kabupaten Nganjuk
21. SAPA MAMA Kabupaten Nganjuk
22. Karang Taruna Kabupaten Nganjuk
23. PSM Kabupaten Nganjuk
24. PKH Kabupaten Nganjuk
25. TKSK Kabupaten Nganjuk
26. Forum Anak Kabupaten Nganjuk
27. TP. PKK
28. GOW
29. PUSPAGA
30. LKSA

2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak mempunyai tanggungjawab atas kerjasama Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
Urusan Sosial			
1	Belum optimalnya penanganan kemiskinan daerah	Belum optimalnya penanganan PMKS/PPKS	Belum tersedianya Data PPKS/ PMKS/ DTKS yang validasi dan update
2			Sinergitas antar PD serta lembaga masyarakat dalam penanganan kemiskinan belum optimal
3			Masih perlu peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung layanan PPKS/ PMKS
4			Sarana Prasarana pendukung layanan PPKS/ PMKS belum terpenuhi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Belum optimalnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis gender	Pemahaman dan penerapan gender di masyarakat masih perlu ditingkatkan
2		Belum tersedianya database sebagai data pembuka wawasan dalam analisis gender	Perlu ditingkatkannya kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Psikolog Klinis dan Konselor
3		Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak berbagai aspek	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu masih kurang maksimal

4			Belum adanya dukungan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak berupa UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sesuai amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 76 ayat 2 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi Kabupaten/ Kota wajib memiliki UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal tersebut didukung dengan Pasal 90 ayat 2 terkait pembentukan UPT. PPA dilakukan paling lambat 3 Tahun terhitung sejak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 di undangkan (9 Mei 2022).
5			Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti Pekerja Anak, Perkawinan Anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
6			Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti Pornografi, Pelecehan Seksual, dan Penipuan, terlihat dari Kasus Pornografi dan *Cybercrime*
7			Belum tersedianya aplikasi pengelolaan Data Gender dan Anak

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Urusan Bidang Sosial			
Sasaran Strategis Resntra K/L (Kementerian Sosial)	**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA**	**Faktor**	
		Penghambat	**Pendorong**
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Data PPKS/ PMKS/ DTKS yang masih perlu validasi secara berkelanjutan	Belum adanya data yang akurat tentang angka kemiskinan	Adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait untuk mengentas kemiskinan melalui program pemerintah
Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	Masih perlu peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung layanan PPKS/ PMKS	Adanya SDM yang terbatas dalam penanganan PMKS/ PPKS	Adanya relawan sosial yang memebantu dalam penanganan PMKS/ PPKS
Urusan Bidang PPPA			

Sasaran Strategis Resntra K/L (Kementerian PPPA)	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Indeks Pembangunan Gender (IPG);	Implementasi kebijakan *gender mainstreaming* dan *gender budgeting* belum berjalan optimal	Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan PUG	Adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait untuk tentang peningkatan PUG
Persentase kabupaten/kota dengan peringkat kla; dan	Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti Pekerja Anak, Perkawinan Anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terbatasnya SDM yang menangani kasus kekerasan	Adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait melalui lembaga PPA
Indeks Kualitas Keluarga	Perlu ditingkatkannya kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Psikolog Klinis dan Konselor	Terbatasnya SDM yang menangani Kasus	Adanya komitmen pemerintah terkait pembentukan UPT PPA
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu masih kurang maksimal	Terbatasnya SDM yang menangani kasus kekerasan	Adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait melalui lembaga PPA

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis :

1. Adanya verifikasi dan validasi data PPKS/ PMKS/ DTKS
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPKS/ PMKS
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
5. Penertiban mekanisme Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gartis Berhadiah (UGB) melalui perluasan sosialisasi Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Isu Strategis :

1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender kepada Masyarakat
2. Peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam implementasi gender
3. Perlu Pembentukan UPT PPA
4. Pembentukan aplikasi pengelolaan data gender dan anak

3.2.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementerian Sosial

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 1. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	1. Indeks Partisipasi Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaat kan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program pe nanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Meningkatkan Efektivitas	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

	Birokrasi dan Pelibatan Publik	

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencangkup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS/PMKS. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memilki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Tujuan Strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.

Tujuan Strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih,

Tabel 4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. . Berdasarkan hal tersebut diatas tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial pada tiga tahun ke depan yaitu:

1. Taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang masih rendah.
2. Kualitas layanan yang belum berkualitas oleh pelaku penyelenggara Kesejahteraan sosial.
3. Tata kelola serta birokrasi yang belum efektif

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan tujuan Kementerian PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan stabilitas

Penyusunan tujuan Renstra Kementerian PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak; dan
5. Pencegahan perkawinan anak.

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
c. TPAK Perempuan; dan
d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks perlindungan anak (ipa);
b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah<usia 18 tahun;
c. Persentase kabupaten/kota dengan peringkat kla; dan
d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. **Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. **Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);

b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi;
b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
c. Tingkat Maturitas SPIP; dan Nilai SAKIP.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan pelayanan Dinas Sosial PPPA dengan telaahan RT RW dan KLHS (indikator SDG's) dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini:

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Dinsos PPPA mempunya beberapa progran diantaranya :
    1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial)
    2. Program pembinaan anak terlantar dan anjal
    3. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
    4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Program pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat)
b. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

    Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah : Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

c. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

   Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya :

   1. Program penguatan kelembagaan PUG
   2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

d. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

   Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya :

   1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
   2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Dalam RT RW tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah juga tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. **Mengurangi Penduduk Miskin**

   Indikator : Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

   a. **Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial**

      Indikator : Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani

      Indikator : Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

2. **Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**

   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

   a. **Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

      Indikator 1 : Persentase Lembaga Pemerintah yang telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

      Indikator 2 : Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

      Indikator 3 : Skor Kabupaten Layak Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Tahun (%)		
					2022	2024	2025	2026
1	**Mengurangi penduduk miskin**		**Persentase Penduduk miskin ekstrim**	**%**	**1,36**	**0,5**	**0,3**	**0,1**
		Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	%	100	100	100	100
			Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	%	71,40	72,5	73	74
2	**Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan**		**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Indeks**	**69,78**	**70,50**	**71,00**	**71,25**
		Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender	%	24,40	33,33	42,26	51,19

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	%	100	100	100	100
			Skor Kabupaten Layak Anak	Skor	(575) Pratama	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesdata	14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA	14/4 23
3.		
4.		
5.		

4.2 Kerangka Logis, Cascading, dan Crosscutting Kinerja Dinas Sosial PPPA, serta Peta Proses Bisnis

Dalam rangka Menyusun dokumen perencanaan pembangunan melalui teknokratik, politis, partisipatif serta *top-down* dan *bottom-up* diperlukan koordinasi dan singkronisasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

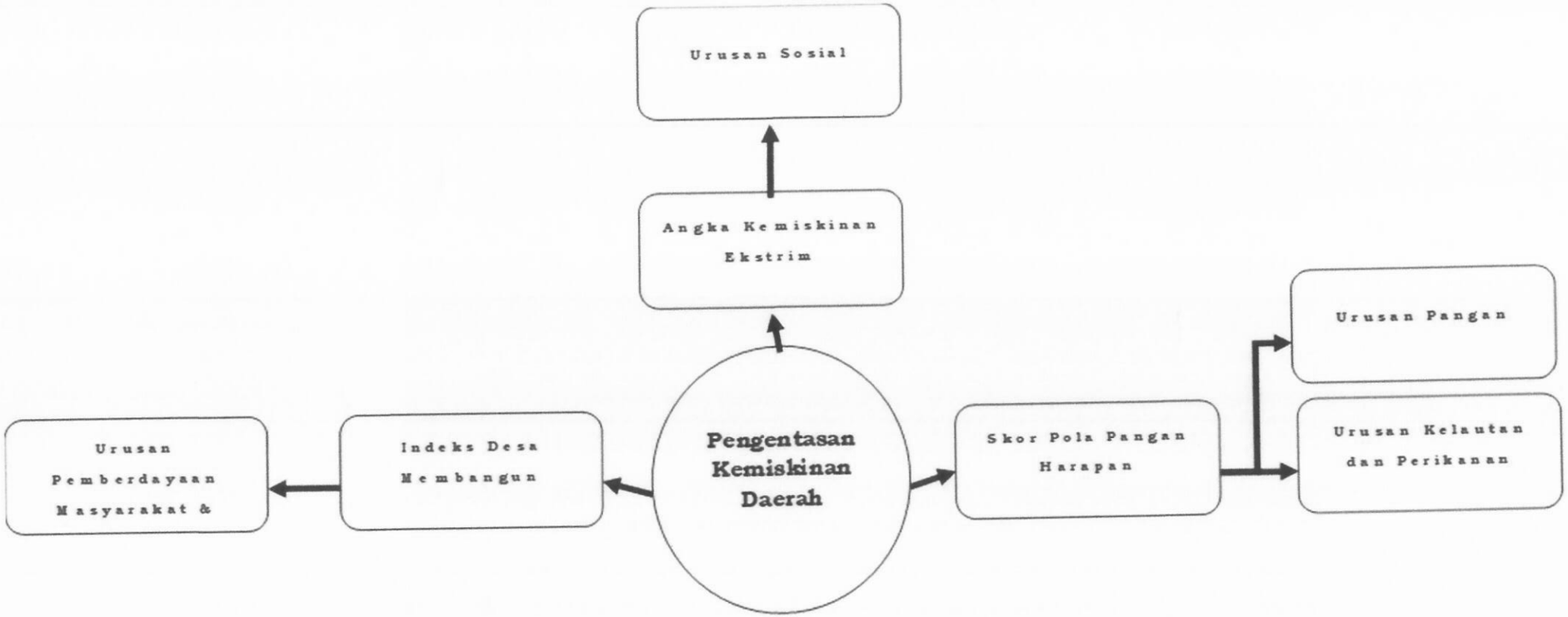
Kerangka logis keterkaitan antara urusan sosial dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diilustrasikan dalam diagram berikut :

Gambar Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

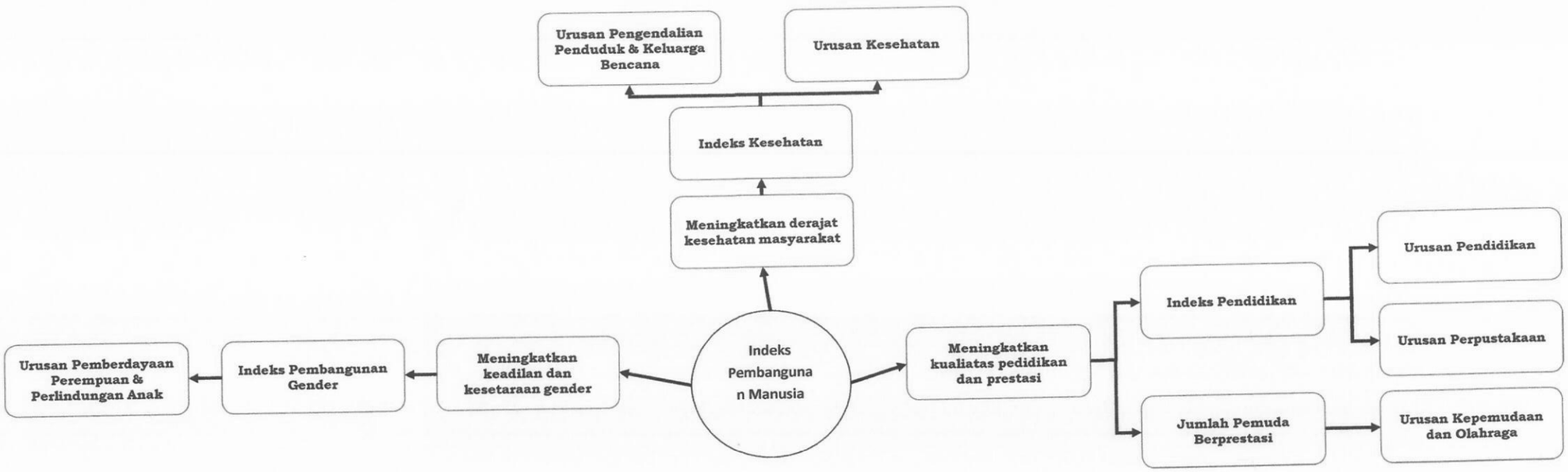


Bagan Kerangka Crosscutting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

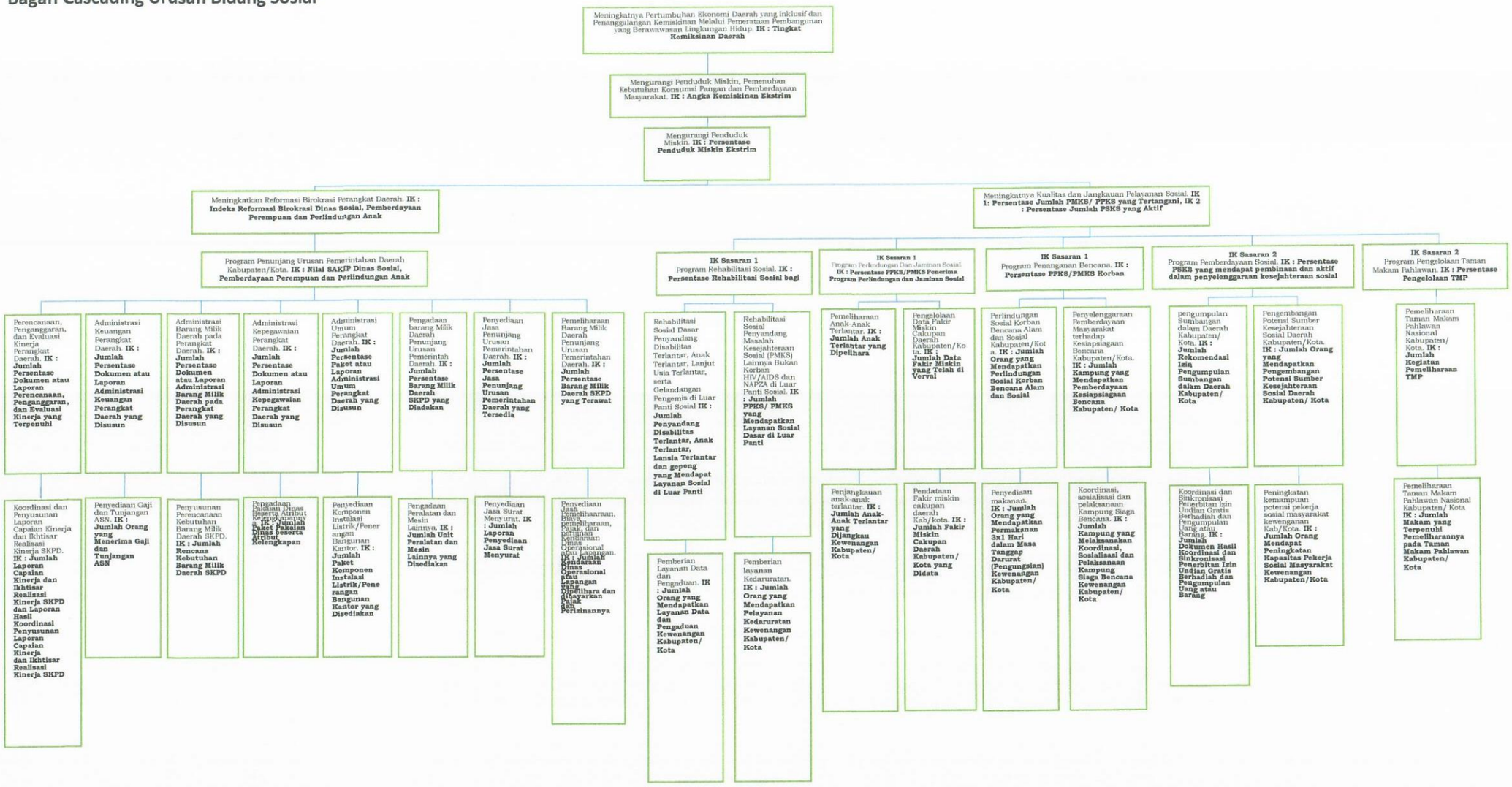
1. Bagan Crosscutting Urusan Bidang Sosial



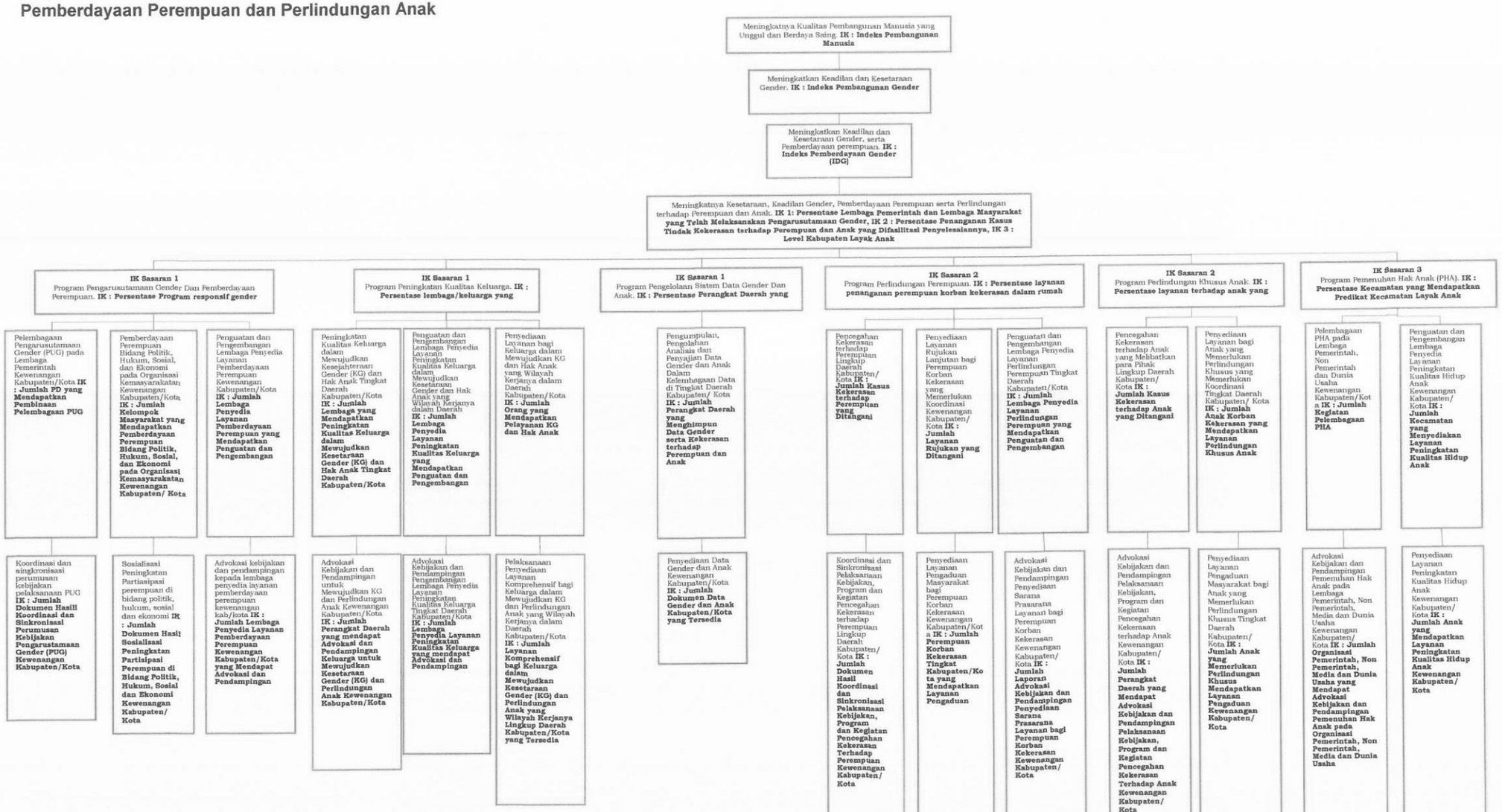
2. Bagan Crosscutting Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



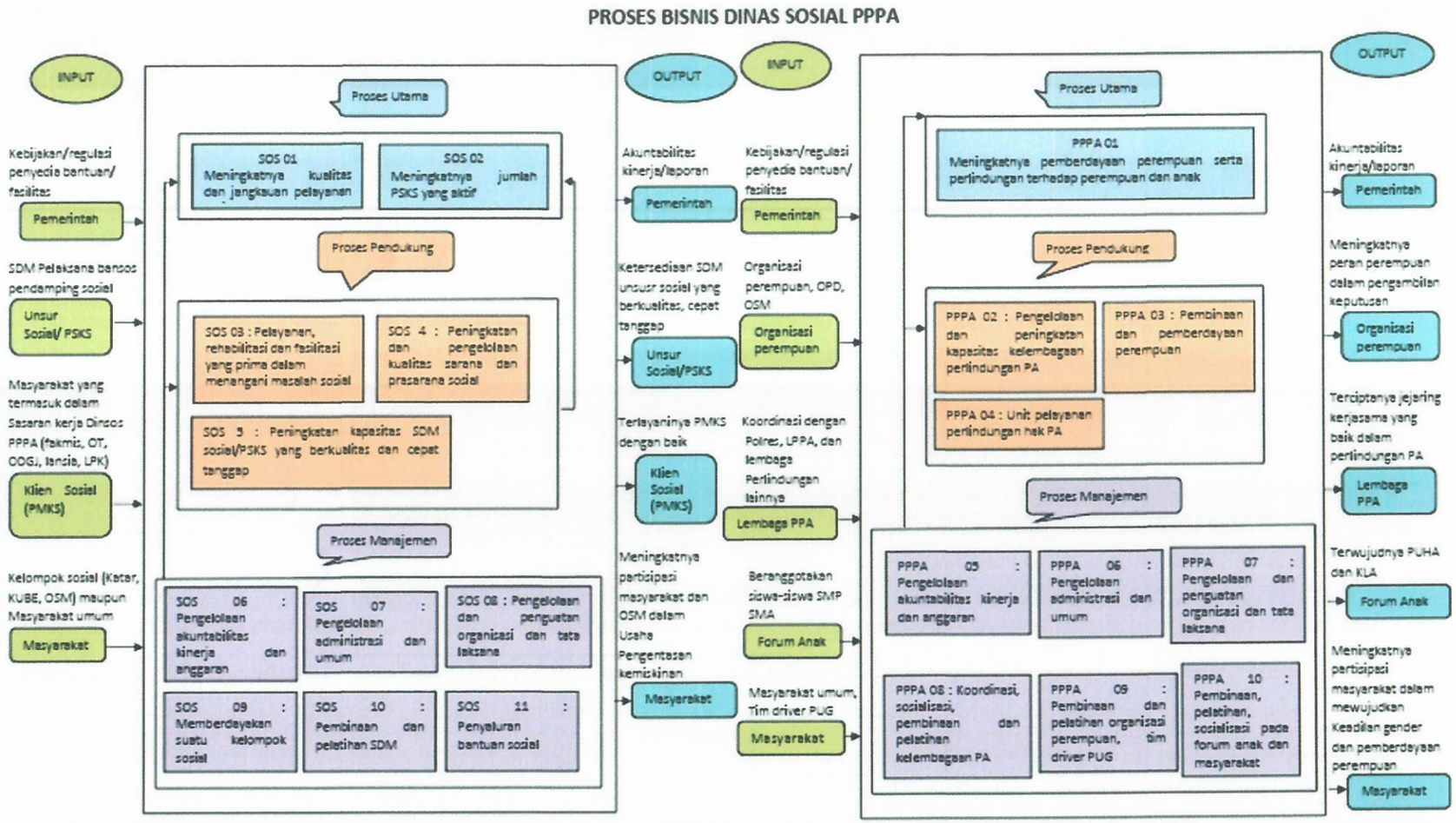
Bagan Cascading Urusan Bidang Sosial



Bagan Cascading Urusan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bagan Proses Bisnis



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial PPPA dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan RPD :		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berawawsan Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Sasaran RPD :		Mengurangi Penduduk Miskin, Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat		
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender		
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1	Mengurangi Penduduk Miskin	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat	- Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahtera an sosial.
			Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau	Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap
			Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
			Meningkatkan kapasitas PSKS	Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat
			Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan sosial	

2	Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menyusun,mereview,mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak
			Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
			Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
			Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

			Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak
			Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan sehingga bisa menjadi tenaga profesional dan memberikan kontribusi pendapatan dalam perekonomian	
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat	
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak	
			Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.	
			Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat Kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	

			Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.	

Strategi

1. Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.
2. Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau.
3. Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menanganani permasalahan sosial.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas PSKS.
6. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
7. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
8. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
9. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
10. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
11. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

12. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
13. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak.
15. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
16. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap.
3. Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat.
5. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
6. Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.
7. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
10. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak.
11. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program , Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Ket
								Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Mengurangi penduduk miskin	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani				1,36		0,50%		0,30%		0,10%						
		Persentase Jumlah PSKS yang Aktif				38,01		38,02		38,03		38,04						
			1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			1 0 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			22.111.030.546		22.742.090.997		24.795.624.267		27.037.587.488		74.575.302.754			

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesejahteraan		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**71,55 Nilai** ✓	**4.919.500.478**	**77 Nilai** ✓	**9.815.975.733** ✓	**78 Nilai** ✓	**10.601.253.791** ✓	**79 Nilai** ✓	**11.449.354.094** ✓	**79 Nilai** ✓	**31.866.583.618** ✓	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	**06**	**01**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi**	**100%**	**18.642.000**	**77%**	**74.740.266**	**78%**	**80.719.487**	**79%**	**87.177.046**	**79%**	**242.636.799**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	06	01	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A Dokumen	N/A	2 Dokumen	10.260.000	2 Dokumen	11.080.800,00	2 Dokumen	11.967.264	6 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendata		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74 Laporan	11.642.000	4 Laporan	14.475.510	4 Laporan	15.633.550,80	4 Laporan	16.884.235	12 Laporan	46.993.296	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	7.000.000	4 Laporan	8.964.756	4 Laporan	9.681.936,48	4 Laporan	10.456.491	12 Laporan	29.103.183	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendah		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**3.908.335.745,40**	**77%**	**4.601.306.304,00**	**78%**	**4.969.410.808,32**	**79%**	**5.366.963.673,00**	**79%**	**14.937.680.785,32**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	06	01	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	3.729.906.885	24 Orang/ Bulan	4.330.711.170	24 Orang/ Bulan	4.677.168.063,60	24 Orang/ Bulan	5.051.341.509	72 Orang/ Bulan	14.059.220.743	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	171.201.860,40	12 Dokumen	221.129.406	12 Dokumen	238.819.758,48	12 Dokumen	257.925.338	36 Dokumen	717.874.502	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rehsos		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.609.000	1 Dokumen	4.212.864	1 Dokumen	4.549.893,12	1 Dokumen	4.913.885	3 Dokumen	13.676.642	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	3.618.000	18 Laporan	4.212.864	18 Laporan	4.549.893,12	18 Laporan	4.913.885	54 Laporan	13.676.642	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendalo		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			1	06	01	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**N/A**	**N/A**	**77%**	**41.040.000,00**	**78%**	**44.323.200,00**	**79%**	**47.869.056,00**	**79%**	**133.232.256,00**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	06	01	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A Laporan	N/A	2 Laporan	10.260.000	2 Laporan	11.080.800,00	2 Laporan	11.967.264	6 Laporan	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A Laporan	N/A	1 Laporan	10.260.000	1 Laporan	11.080.800,00	1 Laporan	11.967.264	3 Laporan	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perlindungan		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**86%**	**10.840.000**	**77%**	**148.500.000**	**78%**	**160.380.000**	**79%**	**173.210.400**	**79%**	**482.090.400**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	06	01	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A Unit	N/A	2 Unit	10.260.000	2 Unit	11.080.800,00	2 Unit	11.967.264	6 Unit	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	4.440.000	24 Paket	43.200.000	24 Paket	46.656.000,00	24 Paket	50.388.480	72 Paket	140.244.480	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehdata		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kasi P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	6.400.000	2 Orang	43.200.000	2 Orang	46.656.000,00	2 Orang	50.388.480	6 Orang	140.244.480	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	N/A	20 Orang	10.800.000	20 Orang	11.664.000,00	20 Orang	12.597.120	60 Orang	35.061.120	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A Orang	N/A	20 Orang	10.260.000	20 Orang	11.080.800,00	20 Orang	11.967.264	60 Orang	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**96%**	**202.535.268**	**77%**	**348.955.976**	**78%**	**376.872.454**	**79%**	**407.022.250**	**79%**	**1.132.850.680**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kordaka		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.500.000	2 Paket	11.583.832	2 Paket	12.510.538,13	2 Paket	13.511.380	6 Paket	37.605.750	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A Paket	N/A	1 Paket	27.000.000	1 Paket	29.160.000,00	1 Paket	31.492.800	3 Paket	87.652.800	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A Paket	N/A	1 Paket	27.000.000	1 Paket	29.160.000,00	1 Paket	31.492.800	3 Paket	87.652.800	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	93.100.618,40	4 Paket	112.520.351	4 Paket	121.521.978,86	4 Paket	131.243.737	12 Paket	365.286.067	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.800.150	2 Paket	46.729.445	2 Paket	50.467.801,03	2 Paket	54.505.225	6 Paket	151.702.471	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	3.888.000	1 Dokumen	4.199.040,00	1 Dokumen	4.534.965	3 Dokumen	12.622.005	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A Paket	N/A	1 Paket	43.200.000	1 Paket	46.656.000,00	1 Paket	50.388.480	3 Paket	140.244.480	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Perdata		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	26.527.750	2 Laporan	34.122.033	2 Laporan	36.851.795,64	2 Laporan	39.799.939	6 Laporan	110.773.768	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.806.750	1 Laporan	22.392.315	1 Laporan	24.183.700,20	1 Laporan	26.118.396	3 Laporan	72.694.411	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	10	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang dikelola	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.06	11	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	10.260.000	1 Dokumen	11.080.800,00	1 Dokumen	11.967.264	3 Dokumen	33.308.064	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan**	**100%**	**111.250.000,00**	**77%**	**2.241.000.000,00**	**78%**	**2.420.280.000,00**	**79%**	**2.613.902.400,00**	**79%**	**7.275.182.400,00**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	06	01	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A Unit	N/A	1 Unit	81.000.000	1 Unit	87.480.000,00	1 Unit	94.478.400	3 Unit	262.958.400	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Perlindungan		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Dinsos PPPA, Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A Unit	N/A	1 Unit	270.000.000	1 Unit	291.600.000,00	1 Unit	314.928.000	3 Unit	876.528.000	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	42.800.000	1 Unit	270.000.000	1 Unit	291.600.000,00	1 Unit	314.928.000	3 Unit	876.528.000	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	68.450.000	2 Unit	216.000.000	2 Unit	233.280.000,00	2 Unit	251.942.400	6 Unit	701.222.400	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	N/A	1 Unit	108.000.000	1 Unit	116.640.000,00	1 Unit	125.971.200	3 Unit	350.611.200	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	N/A	1 Unit	972.000.000	1 Unit	1.049.760.000,00	1 Unit	1.133.740.800	3 Unit	3.155.500.800	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	N/A	1 Unit	162.000.000	1 Unit	174.960.000,00	1 Unit	188.956.800	3 Unit	525.916.800	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana GedunPendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	N/A	1 Unit	162.000.000	1 Unit	174.960.000,00	1 Unit	188.956.800	3 Unit	525.916.800	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesdalak		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**91%**	**180.401.476**	**77%**	**322.812.000**	**78%**	**348.636.960**	**79%**	**376.527.917**	**79%**	**1.047.976.877**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
			1	06	01	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.435.000	2 Laporan	8.640.000	2 Laporan	9.331.200,00	2 Laporan	10.077.696	6 Laporan	28.048.896	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	110.238.476	3 Laporan	171.072.000	3 Laporan	184.757.760,00	3 Laporan	199.538.381	9 Laporan	555.368.141	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	N/A	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	58.320.000,00	1 Laporan	62.985.600	3 Laporan	175.305.600	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.728.000	12 Laporan	89.100.000	12 Laporan	96.228.000,00	12 Laporan	103.926.240	36 Laporan	289.254.240	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**100%**	**487.495.988**	**77%**	**2.037.621.187**	**78%**	**2.200.630.882**	**79%**	**2.376.681.352**	**79%**	**6.614.933.421**	**Sekretariat Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	01	02.09	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A Unit	N/A	7 Unit	216.000.000	7 Unit	233.280.000,00	7 Unit	251.942.400	21 Unit	701.222.400	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemelihaaraan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	274.650.414,40	30 Unit	297.354.143	30 Unit	321.142.474,22	30 Unit	346.833.872	90 Unit	965.330.489	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A Unit	N/A	50 Unit	162.000.000	50 Unit	174.960.000,00	50 Unit	188.956.800	150 Unit	525.916.800	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	23.109.000	25 Unit	45.913.791	25 Unit	49.586.893,76	25 Unit	53.553.845	75 Unit	149.054.530	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A Unit	N/A	3 Unit	108.000.000	3 Unit	116.640.000,00	3 Unit	125.971.200	9 Unit	350.611.200	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		
			1	06	01	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	189.736.574	3 Unit	236.353.253	3 Unit	255.261.513,67	3 Unit	275.682.435	9 Unit	767.297.202	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4-23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid PJM		14/4-23
4.			
5.			

			1	06	01	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A Unit	N/A	3 Unit	486.000.000	3 Unit	524.880.000,00	3 Unit	566.870.400	9 Unit	1.577.750.400	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
			1	06	01	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A Unit	N/A	3 Unit	486.000.000	3 Unit	524.880.000,00	3 Unit	566.870.400	9 Unit	1.577.750.400	Sekretariat Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	**Persentase Jumlah PSKS yang Aktif**								**71,4**		**72,50%**		**73%**		**74%**					
			1	**6**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** ✓	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** ✓	**85%** ✓	**330.823.330**	**85%** ✓	**427.720.437** ✓	**85%** ✓	**449.106.459** ✓	**85%** ✓	**471.561.782** ✓	**85%** ✓	**1.348.388.678** ✓	**Bidang PSK**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rehsos		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	Kabid PSM		14/4/23
4.			
5.			

			1	**6**	**2**	**02.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**18.483.000**	**85%**	**26.829.889**	**85%**	**28.171.383**	**85%**	**29.579.952**	**85%**	**84.581.224**	**Bidang PSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	6	2	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	18.483.000	4 Dokumen	26.829.889	4 Dokumen	28.171.383	4 Dokumen	29.579.952	12 Dokumen	84.581.224	Bidang PSK	Kab. Nganjuk	
			1	**6**	**2**	**02.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**312.340.330**	**85%**	**400.890.548**	**85%**	**420.935.076**	**85%**	**441.981.830**	**85%**	**1.263.807.454**	**Bidang PSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	6	2	02.03	1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenganan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	17.228.000	100 Orang	22.932.000	100 Orang	24.078.600	100 Orang	25.282.530	300 Orang	72.293.130	Bidang PSK	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendaker		14/4-23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	6	2	02.03	2	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	276.629.330	20 Orang	275.630.483	20 Orang	289.412.007	20 Orang	303.882.608	60 Orang	868.925.098	Bidang PSK	Kab. Nganjuk	
			1	6	2	02.03	4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Lembaga	18.483.000	50 Lembaga	23.578.065	50 Lembaga	24.756.968	50 Lembaga	25.994.817	50 Lembaga	74.329.850	Bidang PSK	Kab. Nganjuk	
			1	6	2	02.03	5	Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Sertifikat	N/A	50 Sertifikat	78.750.000	50 Sertifikat	82.687.500	50 Sertifikat	86.821.875	150 Sertifikat	248.259.375	Bidang PSK	Kab. Nganjuk	
		Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani								**100%**		**83%**		**84%**		**85%**							

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesdalak		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3.	Kabid PSM		14/4/23
4.			
5.			

			1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/PMKS** ✓	**85%** ✓	**7.755.473.341**	**85%** ✓	**3.663.546.965** ✓	**85%** ✓	**4.029.901.662** ✓	**85%** ✓	**4.432.891.828** ✓	**85%** ✓	**12.126.340.455** ✓	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	**06**	**04**	**02.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan layanan sosial di luar Panti**	**85%**	**6.409.652.481**	**85%**	**2.269.660.108**	**85%**	**2.496.626.119**	**85%**	**2.746.288.731**	**85%**	**7.512.574.957**	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	04	02.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	1050 orang	157.500.000	1100 orang	173.250.000	1150 orang	190.575.000	3300 orang	521.325.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemberdaya		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	04	02.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	105 orang	15.750.000	110 orang	17.325.000	115 orang	19.057.500	330 orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	3	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	7 orang	23.625.000	7 orang	25.987.500	7 orang	28.586.250	21 orang	78.198.750	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	130 orang	13.125.000	130 orang	14.437.500	140 orang	15.881.250	400 orang	43.443.750	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 orang	56.369.961	125 orang	71.675.605	125 orang	78.843.164	130 orang	86.727.481	380 orang	237.246.250	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	kabid PJM		14-4-23
4.			
5.			

			1	06	04	02.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	420 orang	721.549.740	425 orang	804.300.000	430 orang	884.730.000	435 orang	973.203.000	1.290 orang	2.662.233.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	105 orang	10.500.000	115 orang	11.550.000	120 orang	12.705.000	340 orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalak		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	04	02.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	25 orang	10.500.000	30 orang	11.550.000	35 orang	12.705.000	90 orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	4068 orang	5.049.641.273	25 orang	399.898.852	30 orang	439.888.738	35 orang	483.877.612	90 orang	1.323.665.202	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	10	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	300 orang	582.091.505	325 orang	731.285.651	350 orang	804.414.216	355 orang	884.855.638	1.030 Orang	2.420.555.505	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 orang	N/A	31 orang	15.750.000	35 orang	17.325.000	40 orang	19.057.500	106 orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	32 orang	15.750.000	34 orang	17.325.000	37 orang	19.057.500	103 orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdaldu	14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA	14/4/23
3.	Kabid PJM	14/4/23
4.		
5.		

			1	**06**	**04**	**02.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**82%**	**1.345.820.861**	**85%**	**1.393.886.857**	**85%**	**1.533.275.543**	**85%**	**1.686.603.097**	**85%**	**4.613.765.497**	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	04	02.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	7300 orang	10.500.000	8100 orang	11.550.000	8300 orang	12.705.000	23.700 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	2	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	235 orang	15.750.000	260 orang	17.325.000	285 orang	19.057.500	780 Orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	950 orang	370.780.400	1050 orang	172.940.922	1121 orang	190.235.014	1230 orang	209.258.516	3.401 Orang	572.434.452	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4
3	Kabid PJRSK		14/4/23
4.			
5.			

			1	06	04	02.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	95 orang	21.000.000	125 orang	23.100.000	155 orang	25.410.000	375 Orang	69.510.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	5	penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	120 orang	25.211.768	150 orang	27.732.945	175 orang	30.506.239	445 Orang	83.450.952	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	6	penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	155 orang	10.500.000	210 orang	11.550.000	260 orang	12.705.000	625 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 orang	180.960.461	95 orang	232.611.167	110 orang	255.872.284	120 orang	281.459.512	325 Orang	769.942.963	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pordata		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Dinsos PPPA Kabid PSK		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	04	02.02	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	33 orang	15.750.000	40 orang	17.325.000	52 orang	19.057.500	125 Orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk		
			1	06	04	02.02	9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	105 orang	10.500.000	115 orang	11.550.000	125 orang	12.705.000	345 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	PJM		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	04	02.02	10	Pemberiaan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	21 orang	10.500.000	24 orang	11.550.000	25 orang	12.705.000	70 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	32 orang	15.750.000	34 orang	17.325.000	39 orang	19.057.500	105 Orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	12	pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	22 orang	10.000.000	24 orang	11.550.000	26 orang	12.705.000	30 orang	13.975.500	80 Orang	38.230.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	04	02.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	32 orang	15.750.000	34 orang	17.325.000	39 orang	19.057.500	105 Orang	52.132.500	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalak		14/4-23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4-23
3.	Kabid P3H		14/4-23
4.			
5.			

			1	06	04	02.02	14	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	21 Dokumen	784.080.000	21 Dokumen	825.573.000	21 Dokumen	908.130.300	21 Dokumen	998.943.330	63 Dokumen	2.732.646.630	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS/PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** ✓	**85%** ✓	**3.472.660.850**	**85%** ✓	**8.489.738.084** ✓	**85%** ✓	**9.338.711.892** ✓	**85%** ✓	**10.272.583.082** ✓	**85%** ✓	**28.101.033.058** ✓	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	**06**	**05**	**02.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Jumlah Anak Terlantar yang Dipelihara**	**N/A**	**N/A**	**85%**	**28.061.250**	**85%**	**30.867.375**	**85%**	**33.954.113**	**85%**	**92.882.738**	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	05	02.01	1	Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	25 orang	10.500.000	30 orang	11.550.000	35 orang	12.705.000	90 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	05	02.01	2	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	25 orang	10.500.000	30 orang	11.550.000	35 orang	12.705.000	90 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kordalak		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kasubid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	05	02.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	25 orang	7.061.250	30 orang	7.767.375	35 orang	8.544.113	90 Orang	23.372.738	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	**06**	**05**	**02.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval**	**85%**	**3.472.660.850**	**85%**	**8.461.676.834**	**85%**	**9.307.844.517**	**85%**	**10.238.628.969**	**85%**	**28.008.150.321**	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	05	02.02	1	Pendataan Fakir miskin cakupan daerah Kab/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	N/A orang	N/A	1575 orang	7.875.000	1654 orang	8.662.500	1737 orang	9.528.750	4.966 Orang	26.066.250	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	05	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	263415 keluarga	102.919.850	214.620 keluarga	160.964.834	198.839 keluarga	177.061.317	186.804 keluarga	194.767.449	600.253 Keluarga	532.793.601	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	05	02.02	3	Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1166 keluarga	3.369.741.000	5.166 keluarga	8.282.337.000	5.200 keluarga	9.110.570.700	4.800 keluarga	10.021.627.770	15.166 Keluarga	27.414.535.470	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendapa		14/4-23
2.	Sekdin		14/4 23
3	Dinsos PPPA Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	05	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A orang	N/A	3 orang	10.500.000	4 orang	11.550.000	4 orang	12.705.000	11 Orang	34.755.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA** ✓	**Persentase PPKS/PMKS Korban Bencana yang Ditangani** ✓	**85%** ✓	**5.575.995.554**	**85%** ✓	**285.703.936** ✓	**85%** ✓	**314.274.330** ✓	**85%** ✓	**345.701.763** ✓	**85%** ✓	**945.680.029** ✓	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	**06**	**06**	**02.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**85%**	**5.575.995.554**	**85%**	**47.553.936**	**85%**	**52.309.330**	**85%**	**57.540.263**	**85%**	**157.403.528**	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	06	02.01	1	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	150 Orang	5.575.995.554,40	100 Orang	33.403.936	100 Orang	36.744.329,60	100 Orang	40.418.762,56	300 Orang	110.567.028	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemberdaya		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	06	02.01	2	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Orang	N/A	40 Orang	6.000.000	50 Orang	6.600.000,00	60 Orang	7.260.000,00	150 Orang	19.860.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	06	02.01	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Unit	N/A	1 tempat	2.575.000	1 tempat	2.832.500,00	1 tempat	3.115.750,00	3 tempat	8.523.250	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	06	06	02.01	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Orang	N/A	20 Orang	4.000.000	20 Orang	4.400.000,00	20 Orang	4.840.000,00	60 Orang	13.240.000	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	Kasi P3M		14/4/23
4.			
5.			

			1	06	06	02.01	5	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Orang	N/A	15 Orang	1.575.000	15 Orang	1.732.500,00	15 Orang	1.905.750,00	45 Orang	5.213.250	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
			1	**06**	**06**	**02.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**N/A**	**N/A**	**85%**	**238.150.000**	**85%**	**261.965.000**	**85%**	**288.161.500**	**85%**	**788.276.500**	**Bidang PJRSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	06	02.02	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Kampung	N/A	2 Kampung	10.575.000	2 Kampung	11.632.500,00	2 Kampung	12.795.750,00	6 Kampung	35.003.250	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendam		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			1	06	06	02.02	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Orang	N/A	18 Orang	227.575.000	18 Orang	250.332.500,00	18 Orang	275.365.750,00	54 Orang	753.273.250	**Bidang PJRSK**	Kab. Nganjuk	
		Persentase Jumlah PSKS yang Aktif								**71,4**		**72,50%**		**73%**		**74%**						
			1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** ✓	**Persentase Pengelolaan TMP** ✓	**85%** ✓	**56.576.992**	**85%** ✓	**59.405.842** ✓	**85%** ✓	**62.376.134** ✓	**85%** ✓	**65.494.940** ✓	**85%** ✓	**187.276.916** ✓	**Bidang PSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	**06**	**07**	**02.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP**	**85%**	**56.576.992**	**85%**	**59.405.842**	**85%**	**62.376.134**	**85%**	**65.494.940**	**85%**	**187.276.916**	**Bidang PSK**	**Kab. Nganjuk**	
			1	06	07	02.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	558 makam	56.576.992	560 Makam	59.405.842	562 Makam	62.376.134	564 Makam	65.494.940	1,686 Makam	187.276.916	Bidang PSK	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdaker		14/4
	Sekdin		14/4
2.	Dinsos PPPA		14/4
3.	Kabid P3M		14/4
4.			
5.			

Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)								69,78		70,5		71		71,25						
	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender								24,40%		33,33%		42,26%		51,19%						
			1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
			2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			748.968.864		2.665.508.852		2.812.334.294		2.963.186.682		8.441.029.828				

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdaldu		14/4/23
	Sekdin		14/4/23
2.	Dinsos PPPA		14/4
3.	Kabid PZM		14/4 23
4.			
5.			

			2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**	**100%**	**235.875.227**	**100%**	**318.405.500**	**100%**	**353.875.775**	**100%**	**389.844.563**	**100%**	**1.062.125.838**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	
			2	**08**	**02**	**02.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG**	**100%**	**83.737.277**	**100%**	**115.431.750**	**100%**	**121.203.337**	**100%**	**127.263.504**	**100%**	**363.898.591**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	02	02.01	1	Koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	7.181.000	1 Dokumen	7.938.000	1 Dokumen	8.334.900	1 Dokumen	8.751.645	3 Dokumen	25.024.545	Bidang PP	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesdalin		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			2	08	02	02.01	2	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen Laporan PUG	45.982.500	1 Dokumen	53.140.500	1 Dokumen	55.797.525	1 Dokumen	58.587.401	3 Dokumen	167.525.426	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	02	02.01	3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	18 Perangkat Daerah	22.805.777	42 Perangkat Daerah	27.176.625	43 Perangkat Daerah	28.535.456	45 Perangkat Daerah	29.962.229	45 Perangkat Daerah	85.674.310	Bidang PP	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Kesdalak		14/4 23
2.	Sekdin Dinas PPPA		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	02	02.01	4	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	18 Perangkat Daerah	7.768.000	42 Perangkat Daerah	27.176.625	43 Perangkat Daerah	28.535.456	45 Perangkat Daerah	29.962.229	45 Perangkat Daerah	85.674.310	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**02**	**02.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100%**	**8.445.000**	**100%**	**50.500.000**	**100%**	**52.575.000**	**100%**	**54.728.750**	**100%**	**157.803.750**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tg
1.	Kabid Kesdalin		14/4-23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4-23
3.	Kabid P3M		14/4-23
4.			
5.			

			2	08	02	02.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	4 Dokumen	31.500.000	4 Dokumen	33.075.000	4 Dokumen	34.728.750	4 Dokumen	99.303.750	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	02	02.02	2	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	65 Organisasi	8.445.000	65 Organisasi	19.000.000	65 Organisasi	19.500.000	65 Organisasi	20.000.000	65 Organisasi	58.500.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**02**	**02.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100%**	**143.692.950**	**100%**	**152.473.750**	**100%**	**180.097.438**	**100%**	**207.852.309**	**100%**	**540.423.497**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rehsos		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3.	Dinsos PPPA Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	02	02.03	1	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65 Lembaga	8.655.000	65 Lembaga	10.473.750	65 Lembaga	10.997.438	65 Lembaga	11.547.309	65 Lembaga	33.018.497	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	02	02.03	2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1600 Orang	135.037.950	1725 Orang	100.000.000	1725 Orang	125.000.000	1725 Orang	150.000.000	3175 Orang	375.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	02	02.03	3	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	42.000.000	1 Dokumen	44.100.000	1 Dokumen	46.305.000	1 Dokumen	132.405.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Perdaya		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya								100%		100%		100%		100%						
			2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ✓	Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam ✓ Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100% ✓	91.874.150	100% ✓	486.900.000 ✓	100% ✓	511.245.000 ✓	100% ✓	536.807.249 ✓	100% ✓	1.534.952.249 ✓	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	03	02.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	N/A	N/A	100%	105.597.195	100%	110.877.055	100%	116.420.907	100%	332.895.157	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Kordaan		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid PZM		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	03	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	3 Dokumen	89.847.195	3 Dokumen	94.339.555	3 Dokumen	99.056.532	Dokumen	283.243.282	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	03	02.01	2	Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Perangkat Daerah	N/A	55 Perangkat Daerah	15.750.000	55 Perangkat Daerah	16.537.500	55 Perangkat Daerah	17.364.375	Perangkat Daerah	49.651.875	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**03**	**02.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani**	**100%**	**91.874.150**	**100%**	**321.450.000**	**100%**	**337.522.500**	**100%**	**354.398.625**	**100%**	**1.013.371.125**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4 23
2.	Sekdin		14/4 23
3	Dinsos PPPA Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	03	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Orang	75.000.000	370 Orang	305.700.000	370 Orang	320.985.000	370 Orang	337.034.250	Orang	963.719.250	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	03	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	35 Layanan	16.874.150	20 Layanan	15.750.000	20 Layanan	16.537.500	20 Layanan	17.364.375	Layanan	49.651.875	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**03**	**02.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**59.852.805**	**100%**	**62.845.445**	**100%**	**65.987.717**	**100%**	**188.685.967**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdata		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			2	08	03	02.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Laporan	N/A	2 Laporan	10.500.000	2 Laporan	11.025.000	2 Laporan	11.576.250	Laporan	33.101.250	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	03	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	N/A Orang	N/A	5 Orang	12.862.500	5 Orang	13.505.625	5 Orang	14.180.906	5 Orang	40.549.031	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehabilitasi		14/4/23
2.	Sekdin		14/4/23
3.	Dinsos PPPA Kasubid PSM		14/4/23
4.			
5.			

			2	08	03	02.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	N/A Orang	N/A	2 Orang	1.050.000	2 Orang	1.102.500	2 Orang	1.157.625	2 Orang	3.310.125	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	03	02.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	4 Dokumen	35.440.305	4 Dokumen	37.212.320	4 Dokumen	39.072.936	Dokumen	111.725.561	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
		Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender								**24,40%**		**33,33%**		**42,26%**		**51,19%**						
			2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender**	**100%**	**132.959.340,40**	**100%**	**210.000.000**	**100%**	**218.000.000**	**100%**	**225.000.000**	**100%**	**653.000.000**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	
1.	Kabid Rendalak		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4
3.	Kabid PZM		14/4/23
4.			
5.			

			2	**08**	**04**	**02.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**64.623.766,40**	**100%**	**90.000.000**	**100%**	**93.000.000**	**100%**	**94.000.000**	**100%**	**277.000.000**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	04	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Perangkat Daerah	13.477.250	50 Perangkat Daerah	20.000.000	50 Perangkat Daerah	21.000.000	50 Perangkat Daerah	22.000.000	150 Perangkat Daerah	63.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesbangpol		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	04	02.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	38.145.016,40	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	52.000.000	3 Dokumen	153.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	04	02.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	13.001.500	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	61.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**04**	**02.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100%**	**35.352.250**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**63.000.000**	**100%**	**66.000.000**	**100%**	**189.000.000**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Kesdalu		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid PPN		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	04	02.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 Lembaga	13.755.250	50 Lembaga	20.000.000	50 Lembaga	21.000.000	50 Lembaga	22.000.000	50 Lembaga	63.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	04	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	13.014.500	50 Orang	20.000.000	50 Orang	21.000.000	50 Orang	22.000.000	150 Orang	63.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	04	02.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	8.582.500	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	22.000.000	3 Dokumen	63.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Kesdalan		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kasubid PSM		14/4 23
4.			
5.			

			2	**08**	**04**	**02.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak**	**100%**	**32.983.324**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**62.000.000**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**187.000.000**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	04	02.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	97 Layanan	32.983.324	100 Orang	60.000.000	110 Orang	62.000.000	120 Orang	65.000.000	330 Orang	187.000.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100%**	**16.688.686,40**	**100%**	**27.530.000**	**100%**	**28.656.500**	**100%**	**29.200.000**	**100%**	**85.386.500**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendahe		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			2	**08**	**04**	**02.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**	**100%**	**16.688.686,40**	**100%**	**27.530.000**	**100%**	**28.656.500**	**100%**	**29.200.000**	**100%**	**85.386.500**	**Bidang PP**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	04	02.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	15 Dokumen	9.562.686,40	20 Dokumen	15.000.000	20 Dokumen	15.500.000	20 Dokumen	15.900.000	Dokumen	46.400.000	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
			2	08	04	02.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	7.126.000,00	2 Dokumen	12.530.000	2 Dokumen	13.156.500	20 Dokumen	13.300.000	Dokumen	38.986.500	Bidang PP	Kab. Nganjuk	
		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya								**100%**		**100%**		**100%**		**100%**					

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Kordalu		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100%**	**64.889.404**	**100%**	**915.600.000**	**100%**	**961.380.000**	**100%**	**1.009.449.000**	**100%**	**2.886.429.000**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	**08**	**07**	**02.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani**	**100%**	**64.889.404**	**100%**	**285.600.000**	**100%**	**299.880.000**	**100%**	**314.874.000**	**100%**	**900.354.000**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	07	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Perangkat Daerah	64.889.404	30 Perangkat Daerah	180.600.000	30 Perangkat Daerah	189.630.000	30 Perangkat Daerah	199.111.500	30 Perangkat Daerah	569.341.500	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendaan		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid PZH		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	07	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	110.250.000	2 Dokumen	115.762.500	2 Dokumen	331.012.500	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**07**	**02.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus Anak**	**100%**	N/A	**100%**	**472.500.000**	**100%**	**496.125.000**	**100%**	**520.931.250**	**100%**	**1.489.556.250**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	07	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Orang	N/A	50 Orang	157.500.000	55 Orang	165.375.000	55 Orang	173.643.750	55 Orang	496.518.750	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rehabsos		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	07	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Layanan	N/A	100 Layanan	131.250.000	105 Layanan	137.812.500	105 Layanan	144.703.125	105 Layanan	413.765.625	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	07	02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500	1 Dokumen	331.012.500	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	07	02.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	2 Dokumen	78.750.000	2 Dokumen	82.687.500	2 Dokumen	86.821.875	2 Dokumen	248.259.375	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendalin		14/4-23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4-23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	**08**	**07**	**02.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**157.500.000**	**100%**	**165.375.000**	**100%**	**173.643.750**	**100%**	**496.518.750**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	07	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Laporan	N/A	2 Laporan	52.500.000	2 Laporan	55.125.000	2 Laporan	57.881.250	2 Laporan	165.506.250	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kurdalak		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	Kabid PZM		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	07	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	57.881.250	1 Dokumen	165.506.250	Bidang PPA	Kab. Nganjuk		
			2	08	07	02.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A Dokumen	N/A	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	57.881.250	1 Dokumen	165.506.250	Bidang PPA	Kab. Nganjuk		
		Level Kabupaten Layak Anak	2	08						**(575) Pratama**		**(650) Madya**		**(750) Nindya**		**(850) Utama**						

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesehatan		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100%**	**206.682.056**	**100%**	**707.073.352**	**100%**	**739.177.019**	**100%**	**772.885.870**	**100%**	**2.219.136.241**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	**08**	**06**	**02.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA**	**100%**	**206.682.056**	**100%**	**288.323.352**	**100%**	**300.739.519**	**100%**	**313.776.495**	**100%**	**902.839.366**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	06	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	67.265.150	1 Organisasi	74.951.037	1 Organisasi	78.698.589	1 Organisasi	82.633.518	1 Organisasi	236.283.144	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kaha Rancaka		14/4 23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4 23
3.	P3M		14/4 23
4.			
5.			

			2	08	06	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	139.416.906	3 Dokumen	213.372.315	3 Dokumen	222.040.930	3 Dokumen	231.142.977	3 Dokumen	666.556.222	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	**08**	**06**	**02.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kecamatan yang Menyediakan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**418.750.000**	**100%**	**438.437.500**	**100%**	**459.109.375**	**100%**	**1.316.296.875**	**Bidang PPA**	**Kab. Nganjuk**	
			2	08	06	02.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	N/A	30 Orang	52.500.000	30 Orang	55.125.000	30 Orang	57.881.250	30 Orang	165.506.250	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdaki		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4/23
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

			2	08	06	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping an Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokum en	N/A	2 Dokum en	157.500 .000	2 Dokum en	165.375.0 00	2 Dokum en	173.643.7 50	2 Dokum en	496.518.7 50	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	06	02.02	3	Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokum en	N/A	2 Dokum en	130.000 .000	2 Dokum en	135.250.0 00	2 Dokum en	140.762.5 00	2 Dokum en	406.012.5 00	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
			2	08	06	02.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokum en	N/A	1 Dokum en	78.750. 000	1 Dokum en	82.687.50 0	1 Dokum en	86.821.87 5	1 Dokum en	248.259.3 75	Bidang PPA	Kab. Nganjuk	
JUMLAH TOTAL											**22.859.9 99.410**		**25.407. 599.849**		**27.607.9 58.561**		**30.000.7 74.170**		**83.016.3 32.582**			

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rokbar		14/4/23
2.	Sekdin Dinsos PPPA		14/4
3	PJOK		14/4/23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Rumus penghitungan	Kondisi 2022	Target tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	$PPMI = \frac{JPMI}{JPI} \times 100\%$	1,36	0,5	0,3	0,1
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc\text{-}des)}}{3}$	69,78	70,50	71,00	71,25

7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.2.1 berikut ini:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Rumus Perhitungan	Kondisi 2022	Target Tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	∑ PMKS yang Tertangani / ∑ PMKS yang terdata x 100%	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	∑ PSKS yang Aktif / ∑ PSKS x 100%	71,40	72,5	73	74
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksana-kan Pengarusuta maan Gender	∑ Lembaga pemerintah yang telah melakasanakan PUG / ∑ Lembaga pemerintah yang Ada x 100%	24,40	33,33	42,26	51,19
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaian-nya	∑ Kasus yang tertangani / ∑ Kasus yang dilaporakan x 100%	100	100	100	100
5	Skor Kabupaten Layak Anak		(575) Pratama	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama

7.3 Indikator SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 7.3

Indikator SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Kondisi 2022	Target Tahun (%)		
			2024	2025	2026
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100	100	100
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100	100	100
3	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100	100	100
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100	100	100
5	Jumlah warga negara korban bencana daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.